

**ANALISIS RELASI KUASA DALAM PENGEMBANGAN
TATA KELOLA WISATA BERBASIS KOMUNITAS DI BANTO ROYO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program S-1 Sarjana
Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**MUTIARA YANTI
19042021/2019**

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Analisis Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Tata Kelola
Wisata Berbasis Komunitas Di Banto Royo
Nama : Mutiara Yanti
NIM/TM : 19042021/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juli 2023

Disetujui oleh

Pembimbing,



Hidayatul Fajri., S.AP., M.PA

NIP. 19891128 201903 1 017

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

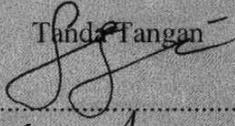
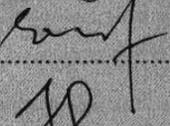
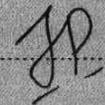
Pada hari Kamis, 27 Juli 2023 pada pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB

**Analisis Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Tata Kelola Wisata Berbasis
Komunitas Di Banto Royo**

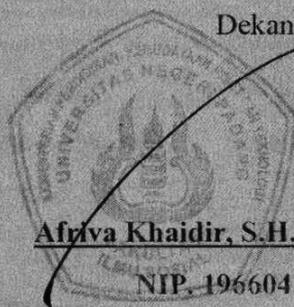
Nama : Mutiara Yanti
NIM/TM : 19042021/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juli 2023

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Hidayatul Fajri, S.Ap., MPA	1..... 
Anggota : Rahmadani Yusran, S. Sos., M.Si	2..... 
Anggota : Iip Permana, S.T., M.T	3..... 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D

NIP. 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Yanti
NIM/TM : 19042021/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Tata Kelola Wisata Berbasis Komunitas Di Banto Royo**” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 20 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Mutiara Yanti

NIM.19042021

ABSTRAK

Mutiara Yanti 19042021: ANALISIS RELASI KUASA DALAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA WISATA BERBASIS KOMUNITAS DI BANTO ROYO

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi kuasa yang terjadi antar aktor dalam pengembangan tata kelola wisata berbasis komunitas di Banto Royo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa menurut Michel Foucault dan teori praxis sosial oleh Pierre Bourdieu mengenai strukturalisasi *capital* atau modal. Penelitian ini dilakukan di wisata Banto Royo Jl. Kaluang Tapi, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik *Snowball Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa dalam pengembangan tata kelola wisata berbasis komunitas di Banto Royo yang dipandang dari segi pengaruh dan kepentingan. Investor sebagai *key player* mendominasi pengembangan wisata Banto Royo melalui modal ekonomi yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan sulit nya akses terhadap pemerintah dan masyarakat lokal karena tidak adanya payung hukum yang mengatur hal tersebut. Pemerintah sebagai *contest setter* memiliki kepentingan yang rendah namun memiliki pengaruh yang tinggi dalam pengembangan wisata. Sedangkan masyarakat lokal sebagai *subject* memiliki pengaruh yang rendah dan kepentingan yang tinggi dalam pengembangan pariwisata Banto Royo. Hal ini dipengaruhi oleh modal yang dimiliki oleh Pemerintah lokal dan masyarakat yang memiliki modal sosial dan modal budaya dalam pengembangan berbasis komunitas di Banto Royo.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Pariwisata Berbasis Komunitas, Tata Kelola Pariwisata, Banto Royo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkat serta kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Analisis Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Tata Kelola Wisata Berbasis Komunitas di Banto Royo*” dengan lancar. Shalawat beriring salam, penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.AP Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ganefri., M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M. Hum, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Hidayatul Fajri, S.AP., MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membimbing serta memberikan saran yang membangun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Kajuni Dt Maani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu aktivitas akademik penulis selama berkuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos. M.Si selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Iip Permana, ST., M.T selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
9. Pegawai tata usaha Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
10. Seluruh informan penelitian penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu dalam penyelesaian data skripsi ini.
11. Teristimewa Orang Tua tercinta Mama Papa, Sisliawati dan Zulkiar, yang selalu mendukung penulis, memotivasi dan mendo"akan penulis selama masa pendidikan.
12. Teristimewa Abang dan Kakak, Irvan Maulana Muhammad dan Mulyati Isnaini, yang selalu mendukung penulis, memotivasi dan mendo"akan penulis selama masa pendidikan.

13. Terkhusus terima kasih kepada Diri Sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

14. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang memberikan warna selama masa perkuliahan dan hingga penyelesaian skripsi ini.

15. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Tiada kata yang bisa penulis persembahkan selain do'a kepada Allah SWT mudah-mudahan segenap bantuan, bimbingan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT dan mendapat balasan setimpal. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penyusun, pembaca, dan peneliti selanjutnya yang akan meneruskan skripsi ini dengan permasalahan yang lainnya.

Padang, Juli 2023

Mutiara Yanti
19042021

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Pembatasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Akademis.....	14
2. Manfaat Teoritis.....	14
3. Manfaat Praktis.....	15
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	16
A. Kajian Teoritis.....	16
1. Relasi Kuasa.....	16
a. Kekuasaan dalam Perspektif Michel Foucault.....	16
b. Relasi Kuasa Sebagai Sebuah Konsep.....	20
2. Teori Praxis Sosial Menurut Pierre Bourdieu.....	23
3. Pengelolaan Pariwisata.....	29

4. Pariwisata Berbasis Komunitas (<i>Community Based Tourism</i>).....	33
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	38
C. Kerangka Konseptual.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Informan Penelitian.....	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Uji Keabsahan Data.....	50
H. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Temuan Umum.....	54
B. Temuan Khusus.....	64
C. Pembahasan.....	96
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wisata Banto Royo.....	7
Gambar 4.1 Logo Objek Wisata Banto Royo.....	54
Gambar 4.2 pendekatan Bapak Andi Sahrandi dengan Niniak Mamak.....	56
Gambar 4.3 Wisata Banto Royo.....	61
Gambar 4.4 Pemetaan <i>stakeholder</i> berdasarkan pengaruh dan kepentingan dalam pengembangan wisata berbasis komunitas di Banto Royo.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Wisata Banto Royo.....	9
Tabel 2.1 Model Relasi Kekuasan.....	22
Tabel 3.1 Informan/Narasumber Penelitian.....	48

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual.....	45
Bagan 3.1 Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman 1992.....	52
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Wisata Banto Royo.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata berbasis komunitas (*Community based tourism*) merupakan sebuah bentuk pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata (Pakpahan, 2018). Ruang lingkup *Community based tourism* adalah pariwisata kelestarian sosial, lingkungan dan budaya (Hadiwijoyo, 2012) dengan inisiatif masyarakat itu sendiri. *Community based tourism* efektif jika bisa mencukupi kebutuhan sosial, berpartisipasi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan, dan juga bisa sejalan dengan kepentingan komersil (Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., dan Paddon, 2010).

Menurut Russell.P *Community based tourism* dapat memberikan pertumbuhan ekonomi dan sosial serta dapat menjaga kelestarian budaya terhadap pengaruh globalisasi yang tinggi (Wijaya et al., 2021). Tujuan dari *Community based tourism* adalah untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan budaya, mengutamakan kepuasan wisatawan, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk daerah tersebut (Strydom et al., 2019).

Untuk mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan dan melestarikan tradisi sosial budaya, alam, dan budaya yang tak ternilai harganya, pariwisata berbasis masyarakat (CBT) adalah industri pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat, dioperasikan oleh masyarakat, dikelola, atau dikoordinasikan di tingkat masyarakat (*The ASEAN Secretariat*, 2016). Terciptanya komunitas wisata, dimana penduduk kawasan wisata dapat memaksimalkan potensinya baik

potensi alam, budaya, maupun sumber daya manusia, adalah bagaimana konsep *community based tourism* dipraktikkan (Liestiandre et al., 2021). Dalam konteks pariwisata berbasis komunitas, keterlibatan masyarakat mengacu pada pengembangan sistem yang menawarkan partisipasi penuh semua pemangku kepentingan masyarakat yang relevan dalam pengambilan keputusan bersama, serta pembagian tanggung jawab dan manfaat (Li & Hunter, 2015).

Dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas tidak terdapat kebijakan atau aturan khusus yang mengatur jalannya pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Namun terdapat kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis komunitas antara lain: *pertama* Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana UU ini memberikan dasar hukum bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kedua, Keputusan Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif nomor KM.56/HM.001/MPEK/2012 tentang pedoman umum bagi pengembangan desa wisata di Indonesia termasuk aspek pengelolaan wisata berbasis komunitas. *Ketiga* Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif No. 16 tentang pemberdayaan masyarakat melalui industri kreatif, peraturan ini mendorong pemberdayaan masyarakat melalui industri kreatif yang mencakup sektor pariwisata berbasis komunitas.

Pengembangan tata kelola wisata berbasis komunitas melibatkan banyak pihak antara lain komunitas lokal, pemerintah, sektor swasta, dan wisatawan. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana yang disampaikan Menteri Pariwisata Arief

Yahya (Ayussa, 2017), sinergi unsur Penta-Helix diperlukan sebagai kunci keberhasilan pengelolaan pariwisata. Hal tersebut membutuhkan kerja sama berkualitas tinggi antara bisnis pariwisata dan pemangku kepentingan (Organisasi Manajemen Destinasi) yang terdiri dari kontribusi Penta-Helix, umumnya diketahui sebagai ABCGM, yaitu akademisi (*Academician*), Bisnis (*Business*), Komunitas (*Community*), Pemerintah (*Government*), dan Media (*Media*) (Matthoriq et al., 2021).

Peraturan Menteri Pariwisata (Permen) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan memuat gagasan mendasar dari pentahelix tersebut. Permen ini menekankan perlunya menggerakkan sistem pariwisata dengan memaksimalkan peran akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM) untuk menciptakan orkestrasi, memastikan kualitas kegiatan, fasilitas, dan layanan, serta untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar dapat memberikan manfaat yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dari pengembangan destinasi, maka setiap unsur memiliki ruang lingkup dan tanggung jawab serta perannya masing-masing. Arah hubungan dalam ruang lingkup masing-masing unsur adalah arah hubungan kolaborasi dan saling mendukung (Putri et al., 2023). Dalam prosesnya, terdapat berbagai relasi kuasa yang mempengaruhi dinamika pengembangan tersebut, karena banyaknya kepentingan dan peran aktor yang meliputi dimensi kultural, politik dan bisnis (Wazni & MS, 2021).

Menurut Pitana dan Gayatri (2005) aktor-aktor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan sistem pariwisata, diantaranya :

Pertama, dari pandangan pemilik lahan bahwa pengelolaan lahan telah diserahkan sepenuhnya kepada penanggungjawab pengelola wisata untuk mengembangkan wisata Banto Royo di lahan mereka, dengan harapan wisata Banto Royo menjadi ciri khas dari wisata yang berada di daerah jorong Kaluang Tapi. Selain itu pemilik lahan mengharapkan agar tetap menjaga kelestarian yang ada di lahan mereka tersebut dengan tidak mengganggu budaya dan adat istiadat daerah. Selain pemilik lahan, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wisata Banto Royo memiliki harapan untuk pengelolaan wisata Banto Royo dapat memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat sekitar, dengan cara dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perkembangan tata kelola wisata Banto Royo.

Kedua, sektor swasta diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak Banto Royo untuk membuka peluang bisnis yang menarik dengan kesepakatan yang dibuat, pihak swasta menjadi mitra dalam pengelolaan dan pengembangan wisata ini, seperti dengan para pelaku-pelaku usaha pariwisata agar dapat menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, sektor swasta diharapkan dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengembangkan produk lokal seperti oleh-oleh dan sovenir khas lokal yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Ketiga, penanggungjawab pengelola wisata (investor) dalam hal ini telah berupaya untuk mengembangkan wisata Banto Royo dengan konsep wisata berbasis komunitas namun dari strategi promosi oleh pihak pemerintah belum

tampak sepenuhnya, maka investor berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk pengembangan wisata Banto Royo.

Keempat, Pemerintah yang mempunyai wewenang pada berbagai wilayah administrasi, dimulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Gagasan dari pemerintah dapat termasuk pada perencanaan pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, pengaturan kebijakan dan promosi partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan.

Relasi kuasa adalah istilah yang merujuk pada dinamika kekuasaan antara individu, kelompok, atau lembaga di dalam suatu sistem sosial dan politik sehingga menunjukkan bahwa praktik relasi kekuasaan dapat terwujud sebagai relasi yang saling mendominasi (Widiastuti & Makhasi, 2019). Relasi kuasa dapat dipahami sebagai cara orang atau kelompok mengontrol atau mempengaruhi orang atau orang lain di mana masing-masing aktor akan berusaha mendapatkan kekuasaan dengan berbagai metode berdasarkan hubungan sosial, struktur dan relasi sosial (Royandi et al., 2018). Dalam relasi kuasa, individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dapat mengontrol atau mempengaruhi individu atau kelompok lain yang memiliki kekuasaan yang lebih rendah dan kekuasaan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk otoritas, sumber daya ekonomi, keahlian atau dukungan publik sehingga aktor kuasa akan terlibat dalam penentuan dan penerapan kebijakan pariwisata (Bowen, D. et al., 2017).

Dalam interaksi sosial di masyarakat terdapat hubungan yang saling berkaitan, namun peranannya tidak terbagi rata, dengan kata lain ada yang dipimpin dan ada yang memerintah (Abhipraya et al., 2021). Michel Foucault

menjelaskan bahwa kekuasaan dibentuk oleh pengetahuan. Singkatnya, tidak ada praktik kekuasaan yang tidak menghasilkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak mempertimbangkan relasi kekuasaan (Foucault & Muzir, 2002).

Foucault menjelaskan bahwa individu modern tampil sebagai objek dan subjek dari penyebaran dan pembentukan jaringan yang kuat. Menurut Foucault, keberadaan kekuasaan ada di mana-mana karena kekuasaan merupakan dimensi dari hubungan yang integral. Artinya dimana ada hubungan, disitu ada kekuasaan (Susilo & Kodir, 2016). Foucault mengakui bahwa dalam hubungan manusia terdapat banyak kekuasaan dan kekuatan yang tersebar luas. Semua kekuatan dan kekuatan ini dapat ditemukan misalnya, dalam berbagai aspek hubungan manusia, seperti hubungan antara satu orang dengan orang lain dan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau situasinya (Bertens. K, 2001).

Penelitian ini selanjutnya akan dilakukan di Banto Royo. Banto Royo merupakan tempat wisata di Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Sebagai destinasi wisata, Banto Royo telah berdiri selama 4 tahun yaitu pada tanggal 28 Oktober 2018. Adapun luas lahan Banto Royo adalah 6,7 h. Banto Royo merupakan tempat wisata yang berbentuk rekreasi air yang menyediakan wahana dan pemandangan alam.



Gambar 1.1 Wisata Banto Royo
Sumber: dokumentasi peneliti, 2023

Sebagai destinasi wisata, Banto Royo memberikan konsep alam kontemporer yang dipadukan dengan taman bermain dan danau, mengambil ide destinasi wisata berbasis komunitas yang mengikutsertakan masyarakat setempat (Fedri & Anggraini, 2022). Obyek wisata Banto Royo dibangun sesuai dengan gagasan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, yang berlandaskan pada prinsip mengikutsertakan masyarakat dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, menjaga lingkungan, memelihara karakter khas, pemerataan secara adil, keuntungan, dan memajukan kepentingan masyarakat (Suri, 2019).

Hubungan awal antara masyarakat khususnya yang melibatkan penduduk lokal dan investor menyebabkan berdirinya Banto Royo. Dalam hubungan ini berlangsung perjanjian pertukaran. Kemudian kekuasaan diberikan kepada investor untuk membangun dan mengembangkan Banto Royo sehingga bisa

berkembang sampai saat ini (Suri, 2019). Dalam proses pembangunan obyek wisata Banto Royo ini terdapat liku-liku tahapan yang dilalui oleh fasilitator atau inisiator, pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya (Dusni, 2021).

Hasil observasi yang peneliti lakukan mendapatkan informasi tentang tahapan pembangunan Banto Royo. Pertama yaitu proses pembangunan Banto Royo yaitu interaksi antara individu dan kelompok, didapatkan hasil musyawarah kesepakatan bahwa masyarakat meminjamkan lahan selama 20 tahun, lahan tersebut merupakan milik suku jambak dan suku payobada, dua (2) orang dari suku jambak dan satu (1) orang dari suku payobada, serta terdapat juga perjanjian antara kedua belah pihak yakni masyarakat lokal dan investor, seperti perjanjian peminjaman lahan, pembagian hasil, dan perekrutan pekerja.

Selanjutnya pada tahap kedua dari observasi yang dilakukan terlihat fenomena adanya ketimpangan relasi kuasa antar investor dan masyarakat lokal yakni investor dalam hal ini, menukarkan modal finansial yang dimilikinya untuk mendapatkan surplus kekuasaan di dalam pengelolaan Banto Royo. Sedangkan masyarakat lokal juga menukarkan modal yang ada pada mereka yaitu lahan seluas lebih kurang 6 hektar supaya dapat memiliki sumber dana untuk operasional masjid. Kemudian tahap terakhir yaitu legitimasi yang diwujudkan melalui perjanjian hitam diatas putih yakni surat izin pemakaian lahan dan surat perjanjian kerjasama kawasan pariwisata Kaluang Tapi.

Selain permasalahan relasi kuasa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Banto Royo. Berdasarkan observasi lapangan terhadap objek wisata Banto Royo maka didapatkan data jumlah kunjungan pengunjung sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Wisata Banto Royo

No	Tahun	Jumlah pengunjung
1	2018	100.180
2	2019	70.234
3	2020	5.695
4	2021	28.133
5	2022	28.898

Sumber: Manajemen Wisata Banto Royo, 2023.

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah pengunjung mengalami peningkatan dan penurunan dalam 4 tahun terakhir, pada tahun 2018 jumlah pengunjung objek wisata Banto Royo adalah 100.180 orang, pada tahun 2019 adalah 70.234 orang. Pada tahun 2020 pada masa Covid-19 adalah 5.695 dan pada tahun 2021 adalah 28.133 orang pada tahun ini pengunjung mengalami peningkatan kembali dan pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 28.989. Selain itu untuk menikmati seluruh fasilitas wahana yang tersedia di wisata Banto Royo, pengunjung perlu membayar biaya tambahan.

Meskipun telah membayar tiket parkir dan tiket masuk, pengunjung hanya dapat menikmati sebagian fasilitas yang tersedia di sana. Untuk menikmati wahana yang disediakan oleh pengelola, pengunjung harus membeli tiket wahana permainan yang tersedia di wisata Banto Royo. Namun pada kenyataannya fasilitas yang tersedia di wisata Banto Royo kurang memadai seperti tidak adanya homestay, rumah makan, pusat oleh-oleh, dan kurangnya tempat sampah yang disediakan oleh pengelola wisata Banto Royo.

Berdasarkan wawancara awal yang telah peneliti lakukan pada hari Kamis, 5 Januari 2023 di tempat wisata Banto Royo dengan salah satu pengelola wisata

Banto Royo menyatakan bahwa pengelolaan Banto Royo masih belum profesional.

“ wisata Banto Royo masih belum terkelola secara profesional. Di mana terdapat Pekerja/karyawan Banto Royo dari luar daerah, selanjutnya dari segi fasilitas, kurangnya fasilitas yang ada dalam wisata Banto Royo seperti tidak adanya homestay, oleh-oleh atau pusat jajanan maupun rumah makan, dll sehingga jika pengunjung ingin makan harus memesan dari luar tempat wisata. Hal ini disebabkan masyarakat yang berdagang makanan tidak menjual makanan sesuai harga pasar sehingga berdampak pada wisata Banto Royo. Kemudian Banto Royo masih belum berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat dan daerah dimana jumlah pengunjung yang datang berkurang dari biasanya yaitu pada waktu sebelum PPKM diberlakukan, wisatawan yang datang dari luar daerah sekitar 10 Bus namun saat ini hanya 4 sampai 5 Bus yang berkunjung ke wisata Banto Royo. Sehingga dengan hal tersebut terjadi penurunan pendapatan, sebelum PPKM omset wisata Banto Royo mencapai 1,6 M sedangkan setelah PPKM pendapatan menurun mencapai 75%. Penurunan pendapatan tersebut berdampak pada pekerja yang ada di wisata Banto Royo di mana sebelum diberlakukannya PPKM terdapat lebih kurang 94 orang sedangkan pada saat ini hanya 23 orang yang bekerja di tempat wisata Banto Royo”.

Dari segi peran komunitas lokal berdasarkan wawancara peneliti pada dengan salah satu pengelola Banto Royo tercatat bahwasannya komunitas lokal berperan namun tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tidak dibentuk terlebih dahulu sebelum Banto Royo dibangun. Sehingga dengan hal tersebut pokdarwis tidak proaktif dalam pengelolaan wisata Banto Royo.

Terakhir belum adanya sinergitas antar aktor dalam tata kelola Wisata Banto Royo salah satunya diakibatkan oleh timpangnya relasi kuasa antar aktor yang terlibat di dalam tata kelola wisata Banto Royo. Hal tersebut seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pengelola wisata Banto Royo tercatat relasi kuasa yang terjadi dalam pengelolaan wisata Banto Royo terdapat

kerjasama dan kuasa antar aktor. Dalam hal ini aktor yang terlibat seperti masyarakat setempat dan pemuda, pengelola wisata Banto Royo, dan pengusaha wisata atau investor. Namun kerjasama dan kuasa antar aktor belum terkoordinasi dan belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat, belum berperan sepenuhnya kelompok sadar wisata (pokdarwis), belum adanya dasawisma dalam tata kelola wisata Banto Royo dan kurangnya promosi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wisata Banto Royo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat lokal wisata Banto Royo tercatat bahwa:

“ ...jika dilihat dari perkembangan wisata Banto Royo, masih belum optimalnya peran pemerintah dalam pengembangan wisata Banto Royo. Selain itu jika dilihat dari sisi ekonominya, untuk masyarakat yang tinggal disekitar wisata, wisata Banto Royo belum memberikan dampak bagi masyarakat, penyebabnya kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perkembangan tata kelola wisata Banto Royo sehingga hasil keputusan yang dibuat kurang memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat lokal”.

Terkait dengan hal tersebut, diperlukannya sinergi antara relasi kuasa dengan aktor lain. Mengenai pembahasan tentang relasi kuasa, masih sedikit studi yang membahas tentang relasi kuasa dalam tata kelola wisata berbasis komunitas. Beberapa studi yang ada memang telah membahas tentang aktor, pemangku kepentingan, ataupun hubungan sosial antar aktor namun belum ada yang secara khusus meneliti relasi kuasa. Penelitian terdahulu yang menunjukkan betapa pentingnya studi relasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Seperti yang telah dilakukan Nurhayati dan Hwang (2002) mengidentifikasikan pemerintah merupakan aktor sentral dalam perkembangan suatu destinasi wisata (Shintani, 2021) meskipun tidak membahas tentang relasi kuasa dari semua aktor yang

terlibat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Papatheodorou (2006) memperkenalkan gagasan pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*) yang memprediksi suatu lokasi akan menjadi pusat industri pariwisata dalam suatu batasan wilayah tertentu jika memiliki keragaman dan kelengkapan daya tarik wisata, akses mudah ke pusat-pusat wisata dan kelengkapan layanan pendukung pariwisata. Kunci agar destinasi wisata menjadi hub (inti) industri pariwisata adalah memahami peran masing-masing sektor dan merealisasikan program pengembangan destinasi wisata (Cahyo & Nuryanti, 2019) dalam hal itu tidak dijelaskan relasi kuasa dalam konsep tersebut dimana hanya membahas pengembangan wisata melalui peran masing-masing sektor dan tidak dibahas juga terkait wisata berbasis komunitas sehingga terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan.

Kemudian penelitian yang dilakukan (Shintani, 2021) terdapat perbedaan antara relasi kuasa dan relasi sosial. Menurut Speadley dan McCurdy dalam Astuti (2012) menjelaskan tentang relasi sosial, yang dimaksud Speadley dan McCurdy adalah hubungan sosial atau relasi yang ada antar individu membutuhkan waktu yang relatif lama membentuk suatu model yang disebut model relasi sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu ***“Analisis Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Tata Kelola Wisata Berbasis Komunitas Di Banto Royo”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah diantaranya:

1. Pengelolaan yang didominasi oleh investor
2. Ketimpangan relasi kuasa antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata Banto Royo.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan wisata Banto Royo.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dikhususkan pada analisis relasi kuasa dalam pengembangan tata kelola wisata berbasis komunitas di Banto Royo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini peneliti mengemukakan rumusan masalah, Bagaimana relasi kuasa yang terjadi antar aktor dalam pengembangan tata kelola wisata berbasis komunitas di Banto Royo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengidentifikasi relasi kuasa yang terjadi

antar aktor dalam pengembangan tata kelola wisata berbasis komunitas di Banto Royo.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan satu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan tata kelola berbasis komunitas melalui aktor yang ada
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan
- c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan maupun pembuatan dalam penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bertambahnya wawasan terkait penelitian tentang relasi kuasa dalam pengembangan tata kelola wisata berbasis komunitas.
- b. Sebagai penerapan ilmu teori yang telah didapat dalam bangku kuliah dan membandingkannya dengan yang ada dilapangan.
- c. Sebagai bahan acuan atau pedoman untuk mahasiswa yang ingin melakukan Tugas Akhir dan dijadikan sebagai arsip kampus.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi relasi kuasa dalam pariwisata Banto Royo sehingga dalam pengembangan tata kelola wisata Banto Royo dapat jauh dikembangkan lebih baik melalui aktor-aktor yang ada.